



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**  
**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.  
Kode Pos 90111. Telp. (0411)3624058 Fax.(0411)3634667.  
website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) e-mail : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)

Makassar, 24 Januari 2025

Kepada  
Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Di  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat – DKI Jakarta

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 699 /SEK.W22-U1/HK2/I/2025

No.	Naskah Dinas Yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Pelayanan Informasi periode Januari sampai dengan Desember 2024	1 (satu) rangkap	Dengan hormat kami kirimkan Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2024

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
SELAKU ATASAN PPID



**Tembusan Laporan kepada:**

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar (sebagai laporan)
2. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Makassar (sebagai laporan)
3. Yth. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar (sebagai laporan)
4. Arsip.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Jalan R.A. Kartini Nomor 18/23, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 90111 Telp. (0411)3624058 Fax. (0411)3634667  
website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id) e-mail : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI  
PERIODE JANUARI – DESEMBER 2024**

**A. RINGKASAN LAPORAN**

Layanan informasi hukum dan peradilan yang diberikan kepada para pencari keadilan melalui meja informasi Pengadilan Negeri Makassar diwujudkan dalam rangka peningkatan layanan prima terhadap masyarakat. Layanan ini merupakan salah satu sarana masyarakat khususnya para pencari keadilan untuk melihat transparansi proses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Makassar. Pemenuhan data dan informasi bagi aparatur penegak hukum dan pencari keadilan melalui layanan meja informasi Pengadilan Negeri Makassar memuat tentang informasi perkara di Pengadilan Negeri Makassar. Pelayanan ini dilakukan dengan menggunakan data yang terdapat pada website Pengadilan Negeri Makassar khususnya info perkara serta berkoordinasi dengan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

**B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

**1. Sarana dan Prasarana**

Meja informasi Pengadilan Negeri Makassar berada di Gedung Induk Pengadilan Negeri Makassar yang dilengkapi dengan beberapa unit komputer yang dapat digunakan oleh para pencari keadilan untuk menelusuri informasi informasi perkara yang sedang berjalan. Selain itu dilengkapi juga dengan printer untuk mencetak informasi yang dibutuhkan dan telepon internal untuk melakukan koordinasi dengan unit lain terkait informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan.

**2. Sumber Daya Manusia**

Pelaksana pelayanan informasi di Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 – 144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 133/KPN.W22.UI/SK.HM1,1.1/V/2024 tentang Penunjukan Pejabat dan Petugas Pelaksana Informasi dan Dokumentasi(PPID) pada Pengadilan Negeri Makassar yang terdiri dari :

No.	PELAKSANA	JABATAN DALAM TIM
1.	KETUA PN MAKASSAR	DEWAN PERTIMBANGAN
2.	PANITERA PN MAKASSAR	DEWAN PERTIMBANGAN
3.	SEKRETARIS PN MAKASSAR	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4.	KEPALA BAGIAN UMUM PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
5.	PANITERA MUDA HUKUM PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
6.	PANITERA MUDA PIDANA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
7.	PANITERA MUDA PHI PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8.	PANITERA MUDA PERDATA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9.	PANITERA MUDA TIPIKOR PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10.	PANITERA MUDA NIAGA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
11.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGORTALA PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
12	KEPALA SUB BAGIAN PTIP PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
13.	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN PN MAKASSAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
14	RINA SYARIFUDDIN, S.H.	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

### 3. Anggaran

Pelayanan informasi pada meja informasi Pengadilan Negeri Makassar saat ini belum memiliki anggaran khusus.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan*	Waktu Rata-rata Pelayanan*	Jumlah Permohonan yang Dikabulkan		Jumlah Permohonan yang Ditolak	Alasan Permohonan yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	20	30/60 Menit	20	-	-	-	-	-
Kepegawaian	1	-	1	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total****</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>21</b>					

\* Jumlah total permohonan informasi untuk setiap jenis informasi yang dimohonkan.

\*\*Dilis dengan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi yang dimohonkan, sejak permohonan diregister sampai dengan informasi diberikan kepada pemohon (jika informasi diberikan) atau pemberitahuan tentang penolakan permohonan (jika informasi ditolak).

\*\*\*Alasan permohonan informasi ditolak, apakah karena alasan informasi yang diminta termasuk kategori informasi rahasia, atau informasi yang dapat diakses publik namun informasi tersebut belum dikuasa atau belum selesai dibuat (misal masih diketik), atau alasan lain

\*\*\*\*Jumlah total dari masing-masing kolom.

**D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI**

Jenis Informasi	Jumlah Pemohon Keberatan*	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan**		Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi***	Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak		Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Pemohon Informasi
Perkara & Putusan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Kepegawaian	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan & Pendisiplinan	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Anggaran & Aset	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Surat Keterangan Tidak pernah Pidana	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Surat Keterangan tidak Pailit	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Surat Keterangan tidak terlibat pada perkara PHI	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	NIHIL	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total*****</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang mengajukan keberatan kepada Atasan PPID atas keputusan PPID.

\*\*Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi.

\*\*\*Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas dengan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.

\*\*\*\*Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal.

\*\*\*\*\*Diisi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengadilan) dan yang menguatkan Pemohon Informasi.

\*\*\*\*\* Jumlah total dari masing-masing kolom.

## E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala Eksternal kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelayanan informasi, untuk kendala internal dalam memberikan pelayanan infomasi jika informasi yang diminta adalah putusan perkara lama yang belum terinput di SIPP membutuhkan waktu yang lama.

## F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Peningkatan layanan pada meja informasi dengan pelayanan prima petugas meja informasi dalam memberikan informasi hukum dan peradilan sebagai upaya untuk meningkatkan layanan yang diberikan, selain dari informasi yang tersedia dan kemudahan untuk mencari informasi. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dengan mengembangkan layanan informasi berbasis elektronik serta memberikan leaflet tata cara pencarian informasi perkara dan berkoordinasi dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung agar informasi perkara pada website terkait Info Perkara Mahkamah Agung terupdate sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.



Makassar, 20 Januari 2025

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dan Dokumentasi (PPID)

A handwritten signature in black ink that reads 'NURIYA AWAD, S.H.'.